

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALEMBANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

ISTIQOMA

NIM. 07011382025240

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALEMBANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2019**

SKIRPSI

Diajukan Oleh:

ISTIQOMA

NIM. 07011382025240

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2024

Pembimbing

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Mei 2024

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

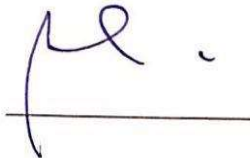
Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Ketua



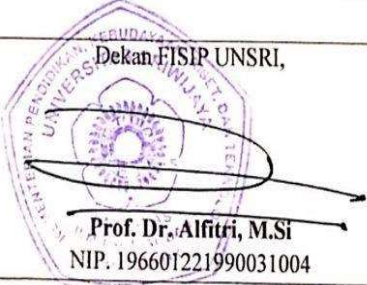
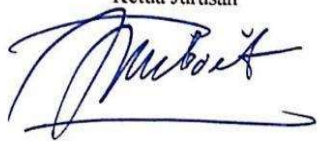
Drs. Mardianto, M.Si
Anggota



Junaidi, S.IP., M.Si
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI, Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
--	---

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqoma

Nim : 07011382025240

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 " ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah lembar orisinalitas ini saya buat dengan segenap kejujuran dan integritas.

Yang membuat pernyataan

Palembang, April 2024

METERAI
TEMPEL
BC57FALX127481474

Istiqoma

NIM. 07011382025240

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat,
bukan hanya diingat”**

- Imam Syafi’I

Atas izin Allah Swt Skripsi ini saya persembahkan untuk:

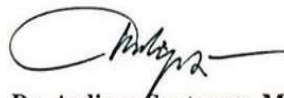
1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Hamran dan Ibu Rosita yang selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini
2. Saudara saya yaitu Dapit, yanto, Lesita, Almarhum aji
3. Dosen dan staf fisip Unsri
4. Kepada teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan yaitu Iren, Saski, Tantri, Pemungkas, Evi, dan pacar saya ivan
5. terima kasih kepada almamater saya Universitas Sriwijaya Terima kasih atas segala pengalaman berharga, ilmu yang telah diberikan, Semoga UNSRI terus berkembang dan memberi manfaat bagi banyak generasi mendatang.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Strategi Komisi Pemilihan Kota Palembang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Latar belakang penelitian ini ialah masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi pada pemilu tahun 2019. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum Kota Palembang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kota Palembang Tahun 2019. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi KPU kota Palembang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Teori dalam penelitian ini Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn yang terdiri dari 3 tahap yaitu menggambarkan rencana program, menentukan biaya beserta waktu pelaksanaan. sumber daya, prosedur program. menentukan jadwal kegiatan, mengadakan pemantauan atau pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini strategi yang dilakukan program informasi pemilu sosialisai kepada masyarakat menyebarluaskan tentang tahapan pemilu dan pentingnya menggunakan hak pilih. faktor kendala atau hambatan nyataanya strategi ini memiliki kekurangan yaitu ketidaktepatan perencanaan perkiraan anggaran untuk fasilitas sosialisasi. Tidak semua pegawai yang seharusnya ikut sosialisai dilibatkan, karena masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi dilibatkan dalam sosialisasi pemilu.

Kata Kunci : Strategi, Pemilu, Komisi pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat.

Pembimbing



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Palembang Mei 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP.1969111019940110

ABSTRACT

This research discusses the Strategy of the Palembang City General Election Commission in Efforts to Increase Public Participation in the 2019 Legislative General Election. The background to this research is that there are still people who did not participate in the 2019 election. The aim of this research is to find out the strategy of the Palembang City general election commission in Efforts to increase community participation in the 2019 Legislative Election in Palembang City. Identify factors that are obstacles faced by the Palembang City KPU in order to increase community participation. The theory in this research, Brian W Hogwood and Lewis A Gunn, consists of 3 stages, namely describing the program plan, determining costs and implementation time. resources, program procedures. determining activity schedules, conducting monitoring or supervision. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis. The results of this research started the program that was carried out, disseminating election information to the public, spreading the word about the stages of the election and the importance of exercising the right to vote. In fact, this strategy has shortcomings, namely the inaccuracy of planning budget estimates for socialization facilities. Not all employees who should have taken part in the socialization were involved, because there were still people who were not involved in the election socialization.

Keywords: *Strategy, Election, General Election Commission, Community Participation.*

Pembimbing



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Palembang Mei 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA

NIP.1969111019940110

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019”

Dalam penyusunan penelitian ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT, tuhan semesta yang telah memberikan rahmat, sehat dan ridhonya kepada hamba.
2. Kedua orang tua saya. Bapak Hamran dan ibu Rosita kedua Orang Tua saya. yang tak pernah kenal lelah mendidik saya dan memberikan dukungan baik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku ketua jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Administrasi Publik beserta Staf FISIP yang terlibat dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Teman-teman saya irene, tantree, evoy, siksa, dan putray.
7. Pacar saya Ivan Arista yang selalu memberi semangat saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi, maka penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Proposal penelitian ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih, semoga proposal penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Manfaat	8
BAB II.....	10
TINJUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.2. Strategi	10
2.3. Kebijakan Publik.....	11
2.3.1 Teori Strategi Kebijakan Publik.....	12
2.3.2 Implementasi Kebijakan	14
2.3.3 Strategi Implementasi Kebijakan	15
2.3.4 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	16
2.4. Partisipasi Masyarakat	18
2.5. Penelitian Terdahulu	21
2.6. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31

3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2 Definisi Konsep	31
3.3 Fokus Penelitian.....	33
(Sumber: diola oleh penulis, 2024).....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5. Informan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang	40
4.1.1 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	40
4.1.2 Visi dan Misi KPU.....	41
4.1.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Palembang	41
4.1.4 Struktur Organisasi KPU Kota Palembang	44
4.2 Deskripsi Informan atau Responden Penelitian	46
4.3 Hasil Penelitian	46
4.3.1 Menggambarkan rencana program, Menentukan biaya beserta waktu pelaksanaan	47
4.3.2 Sumber daya, Prosedur/ SOP program.....	56
4.3.3 Menentukan jadwal kegiatan, mengadakan pengawasan dalam kelancaran pelaksanaan.....	62
4.4. Pembahasan	67
4.4.1 Menggambarkan rencana program, Menentukan biaya beserta waktu pelaksanaa.....	67
4.4.2 Sumber daya, Prosedur/ SOP program.....	69
4.4.3 Menentukan jadwal kegiatan, mengadakan pengawasan dalam kelancaran pelaksanaan	70
BAB V	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu Legislatif 2014	5
Gambar 2 : Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu Legislatif 2014	6
Gambar 3 : Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4 : Struktur Komisioner KPU Kota Palembang	46
Gambar 5 : Struktur Sekretariat KPU Kota Palembang	47
Gambar 6 : Program Sosialisasi Terhadap Masyarakat	61
Gambar 7 : Program Sosialisasi Terhadap Masyarakat.....	64
Gambar 8 : Jadwal Pemilu Tahun 2019	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2 : Fokus Penelitian.....	36
Tabel 3 : Narasumber Wawancara	38
Tabel 4 : Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	52

DAFTAR SINGKATAN

- KPU : Komisi Pemilihan Umum
- PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- TPS : Tempat Pemungutan Suara
- UUD : Undang-undang Dasar
- DPT : Daftar Pemilih Tetap
- Golput : Golongan Putih
- Pemilu : Pemilihan Umum
- Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi ialah penerapan sistem kenegaraan yang dominan dipakai Negara-negara. Di Indonesia, rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Negara ini mempunyai sistem politik yang demokratis. Demokrasi (sistem negara) menempatkan suara rakyat sebagai suara tertinggi. sebagaimana di tegaskan didalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yaitu “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Demokrasi telah ada pada saat Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tertuang pada Pancasila yaitu di sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dibandingkan pada sistem pemerintahan lainnya demokrasi dilihat lebih bisa diterima. terdapat elemen *self goverment* Salah satunya di dalam demokrasi. Oleh karena itu, terlibatnya masyarakat merupakan bentuk terwujudnya kedaulatan rakyat, dan yang paling utama untuk menetapkan siapa-siapa yang harus duduk di dalam pemerintahan, termaksud menentukan siapa yang harus mengawasi pemerintahan tersebut. Didalam demokrasi, adanya keterlibatan dari semua lapisan masyarakat inilah yang dibuktikan dengan atau melalui pemilu.

Pemilu merupakan lambang serta tolak ukur utama atau sebagai parameter dalam demokrasi pada negara demokratis. Diadakannya Pemilihan umum (pemilu) ialah suatu bentuk perwujudan dari demokrasi indonesia. Pemilu dimaknai sebagai tempat perwujudan kedaulatan rakyat yang output atau menciptakan wakil rakyat aspiratif, berkualitas, dan dapat tanggung jawab berlandas UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945 Pancasila. Pada negara dengan kenegaraan demokrasi, pemilu ialah salah satu bagian penting untuk memberikan semua akumulasi keinginan masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, pemilu merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam memilih wakil rakyat dalam waktu menjabat 5 tahun. Setiap warga Negara memiliki hak berdemokrasi untuk menetapkan masa depan bangsa Indonesia. Warga Negara memiliki hak itu telah diatur di pada UU No 7 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat(1 dan 2) menjelaskan “Warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan, berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah atau telah kawin sebelumnya, dan telah didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, berhak memilih.

KPU bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai suatu kesatuan yang tetap, otonom, dan bersifat nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 1 ayat (8). Komisi pemilihan umum (KPU) mempunyai daerah kerja mencakup keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai UU No. 7 Tahun 2017 pasal 7 ayat (3) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, KPU bersifat independen. KPU menunaikan tugas serta kuasanya lepas atas pengaruh pihak apapun. Sekretariat Jenderal, sebuah organisasi pemerintah diketuai Sekretaris Jenderal, membantu melaksanakan tanggung jawab dan wewenang KPU dengan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberadaannya merupakan implikasi dari kenegaraan demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. Keanggotaan KPU dipilih dengan berbagai tahapan yang tidak mudah, yang nantinya dituntut memenuhi kepentingan pihak baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat secara umum.

Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan secara konsisten.

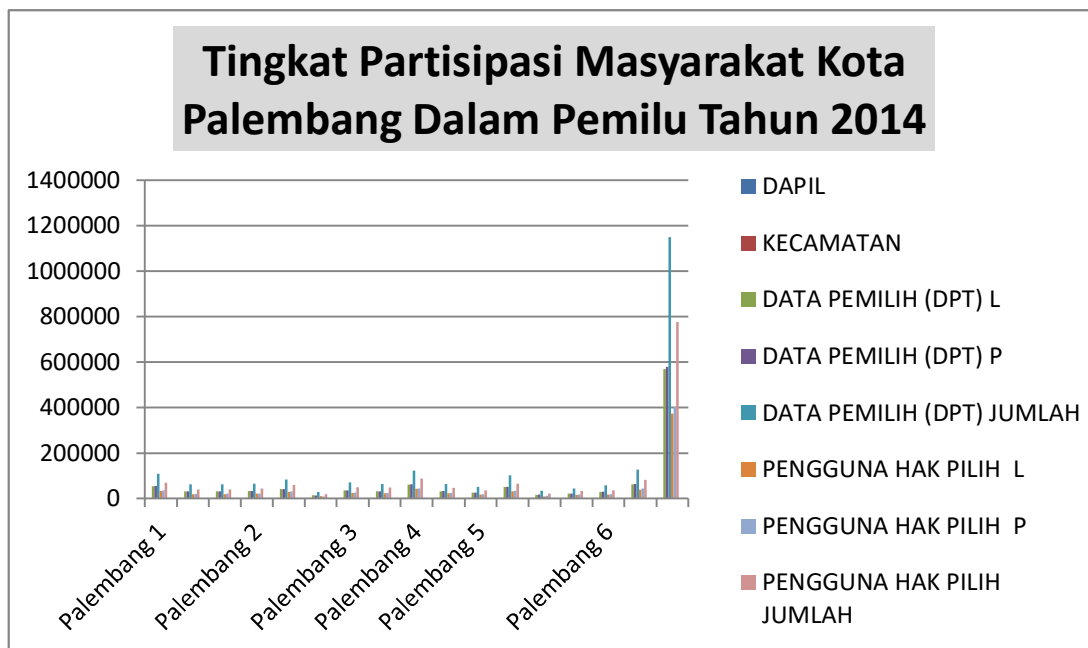
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) bahwa KPU provinsi serta kabupaten/kota dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan edukasi memilih, sosialisasi melalui sosialisasi, dan memastikan setiap orang mempunyai akses sama terhadap kesempatan. Demi ikut serta dalam pemilu sebagai perorangan atau partai. Antusias dan besarnya partisipasi politik masyarakat dalam memanfaatkan haknya untuk memilih menentukan keberhasilan pada pemilu.

KPU mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan untuk pemilih supaya senantiasa mementingkan independensi, integritas diri serta profesionalitas dalam dunia kerja. Bila tak digerakkan atau di laksanakan ambivalensi akan terjadi. Terjalannya proses pendidikan pemilih, sosialisasi dan sebagainya yang di lakukan oleh komisi pemilihan umum nantinya akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilihan umum di setiap daerah (Syafri, 1945) Pada hakekatnya, keterlibatan rakyat dalam pemilu berfungsi sebagai cara bagi mereka untuk memiliki kendali atas jalannya pemerintahan terpilih. Selain itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyajikan mandat mereka. Selanjutnya, keterlibatan politik komunitas dapat berfungsi sebagai sarana bagi anggota masyarakat yang aktif dengan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan. Batas kesertaan pemilih merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi karena secara langsung mempengaruhi hasil pemilu dan tata kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, negara-negara seperti Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokratis

lebih mengutamakan memastikan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum, terlepas dari hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih. (Pratama Putri, 2016) Walaupun bukan faktor satu-satunya untuk menentukan sukses ataupun tidaknya pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi pemegang kunci dalam setiap acara gelaran pemilu, namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat jika dilihat lebih rendah maka pemilu bisa dikatakan kurang berhasil. Berarti dapat diartikan partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu pilar yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilu. partisipasi politik masyarakat Peraturan KPU khusus mengatur pemilu (Gleko et al., 2017)

Pemungutan suara terhadap wakil-wakil untuk menduduki jabatan di lembaga legislatif, seperti dewan perwakilan rakyat atau parlemen, dilakukan melalui pemilihan umum legislatif. Pemilihan ini penting untuk menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan publik dan membuat keputusan terkait undang-undang dan kebijakan negara. Warga negara memilih wakilnya untuk bertugas di badan legislatif seperti dewan perwakilan rakyat dan parlemen melalui proses pemilihan legislatif. Di Indonesia, partai politik terlibat dalam pemilu untuk memilih wakil DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Politik adalah “organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu” (Hogopain dalam Mufti, 2013:123).

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu Legislatif 2014



(Sumber: KPU Kota Palembang diolah oleh penulis, 2023)

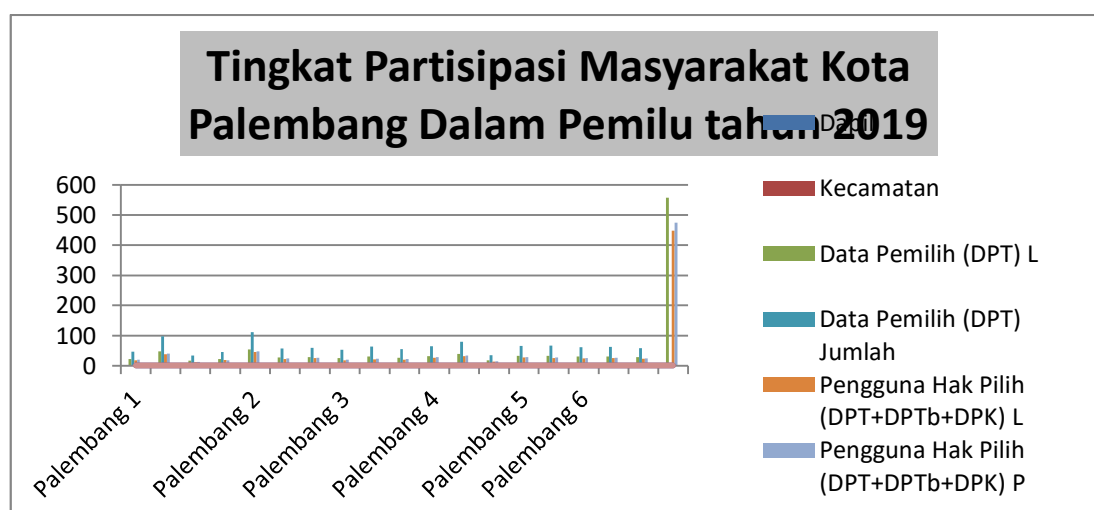
Berdasarkan gambar 1 tingkat partisipasi masyarakat di kota Palembang pada tahun 2014 senilai 68,02% dari total 16 kecamatan di kota Palembang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi yaitu terletak pada kecamatan Plaju mencapai 75,58%, sedangkan yang terendah terletak pada kecamatan Ilir Timur II sebesar 61,13%. Dapat menunjukkan pemilu Legislatif pada tahun 2014 tak menyentuh tujuan saat ditentukan KPU Kota Palembang ialah 80%, sehingga di tahun 2014 masih banyak khilayak yang tidak berpartisipasi pada pemilu atau disebut Golongan putih (Golput).

Gatut Suksano (2013: 45-46) mengemukakan bahwa Pemuda dan pelajar yang memprotes pemilu 1971 adalah pihak yang mendirikan Golput, karena hanya sedikit orang yang berani datang ke tempat pemungutan suara pada saat itu karena takut

dibubarkan oleh pihak berwenang. Untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah memutuskan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.124.236 orang. Perinciannya, sebanyak 556.213 pemilih laki-laki serta 568.213 pemilih perempuan. KPU Palembang menetapkan DPT Palembang sebanyak 1.123.228, terdiri dari pemilih laki-laki 555.848 serta 567.380 pemilih perempuan.

Keadaan ini sebagaimana data yang dikemukakan oleh KPU kota Palembang dimana bisa dilihat di tabel 2. Tabel 2 statistik perolehan suara dan keterlibatan masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) dibandingkan tahun 2014 yaitu mencapai sebesar 81,99% dari total 18 kecamatan di kota Palembang. Data tersebut dapat dikemukakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tabel 2 berikut.

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu Legislatif 2019



(Sumber: KPU Kota Palembang diolah oleh penulis, 2023)

Dari data gambar 2 tingkat partisipasi masyarakat yang tertinggi pada kecamatan Alang-alang Lebar mencapai 88,24%, sedangkan tingkat partisipasi yang terendah pada kecamatan Bukit Kecil mencapai 69,42%. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 68,02% sampai mencapai 81,99% dibandingkan Pemilu Legislatif sebelumnya yaitu pada tahun 2014. Tapi di Pemilu Legislatif tahun 2019 berdasarkan kecamatan di Kota Palembang masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam sebuah pemilihan umum. Dari hal itu partisipasi masih rendah jadi perlu di teliti lebih lanjut tentang strategi Untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019, KPU Kota Palembang berupaya mendongkrak partisipasi pemilih.

1.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian sebelumnya:

1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum Kota Palembang pada upaya meningkatkan kesertaan khilayak di Pemilu Legislatif di Kota Palembang Tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum kota Palembang pada rangka meningkatkan pasrtisipasi masyarakat?

1.3. Tujuan

Adapaun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum Kota Palembang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kota Palembang Tahun 2019.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi KPU kota Palembang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan teori ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan Untuk mendapatkan gambaran tentang strategi yang dilakukan dalam partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu, dan mengenali faktor-faktor yang menjadi kendala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya bagi para pembaca dan menjadi studi terkait masalah politik

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Mulyadi, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.801>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 40. www.publikasi.unitri.ac.id
- Haryono, D. (2019). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900>
- Moento, P. A., Fitriani, F., & Maturan, A. Y. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.35724/sjias.v8i2.2518>
- Nidia, R. D., & Maharani, A. E. P. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Surakarta. *Res Publica*, 2(3), 330–347. <https://news.detik>.
- Pertiwi, T., & Rahmawati, S. (2019). Strategi KPU Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Partisipasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2), 1–8. <https://doi.org/10.21831/socia.v15i2.21962>
- Pratama Putri, M. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul*, 4(1), 30–43.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansyah, A. G. (2020). Strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Sulistiowati, M., & Bisyrri, M. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat pada

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 19–36. <https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4886>

Suraja, D. R. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Docum*